

22. PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa “ *RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat* “. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 343 disebutkan bahwa “ *Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan* “, yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD yang dimaksud meliputi perubahan :

- a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. target sasaran pembangunan daerah;
- c. prioritas pembangunan daerah;
- d. penambahan dan / atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari Perumusan rancangan Perubahan renja Perangkat daerah dan Penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafons Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) Tahun 2025 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan sejalan dengan perubahan dinamika penyelenggaraan perintah daerah, perubahan kebijakan terkait upaya – upaya pencapaian target – target RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dengan mengacu pada program strategis daerah yang tertuang pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja PD Kota Blitar Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55);

25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan Perangkat daerah tahun 2025 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2025 dan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan |
| BAB II | Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025. |
| BAB III | Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. |
| BAB IV | Penutup |

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang sedang berjalan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Perubahan Renja tahun berjalan dan Renja SKPD tahun berikutnya.

Berdasarkan tabel evaluasi hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I diperoleh rata-rata capaian kinerja program yaitu 95,31% dimana capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 87,26 dengan tingkat capaian 106,41%. Sedangkan capaian kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum adalah 98,67% dengan tingkat capaian sebesar 100,54%. Capaian kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran yaitu 100% dengan tingkat capaian 100%.

Secara umum faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah sebagai berikut :

1. Patroli rutin penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilakukan sudah optimal akan tetapi belum menjangkau seluruh wilayah.
2. Sosialisasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum belum menjangkau seluruh masyarakat
3. Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum masih kurang.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yaitu capaian kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sampai dengan triwulan I belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian target kinerja tersebut adalah :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para penanggungjawab kegiatan dengan segenap aparatur dan stake holder Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pemetaan kebutuhan disesuaikan dengan target kinerja dan pencapaian capaian indikator kinerja utama organisasi

Sedangkan untuk realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp. 2.375.418.398,00 dari total anggaran belanja sebesar Rp. 12.502.116.104,00. Hal ini menunjukkan tingkat capaian anggaran sebesar 19,00 %. Adapun penyebab tingkat capaian realisasi anggaran yang kurang dari 20 % dikarenakan perubahan jadwal kegiatan.

Realisasi tingkat capaian target indikator program dan kegiatan dalam Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025 secara singkat sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
1	Meningkatkan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,41		6,76		8,06												Satuan Polisi Pamong Praja
2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	14,64		8,83		11,40												Satuan Polisi Pamong Praja
3		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	99,04	45.579.227.043,55	98	26.241.811.654,49	98,14	4.129.240.570,00	98,67	237.819.468,00	98,67	237.819.468,00	98,67	237.819.468,00	100,54	5,76	99,63	0,52	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	99,39		96,89		97,71		97,92		97,92		97,92		100,21		98,52		Satuan Polisi Pamong Praja
4		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100	43.895.085.542,55	100	22.083.343.795,49	100	3.088.937.736,00	100,00	213.719.468,00	100	213.719.468,00	100	213.719.468,00	100	6,91	100	0,48	
			Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	60		20		20		20		20		40		2		16,6		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
5		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	36	1.559.697.958,50	36	2.010.618.680,00	12	80.933.800,00	3,00	0,00	3	0,00	3	0,00	25	0	8,3	0,0	
6		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	2.094.275.083,08	2	5.854.908.080,00	1	114.544.736,00	0,00	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	2,2	0,0	0,2	
7		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	135	700.453.604,00	70	726.522.480,00	45	175.570.100,00	0,00	3.503.000,00	0	3.503.000,00	0	3.503.000,00	0	2	0,0	3	
8		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah	4	39.309.262.140,97	1216	13.207.235.235,49	4	2.679.241.100,00	1,00	207.716.468,00	1	207.716.468,00	1	207.716.468,00	25	7,8	0,0	0,0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
		Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																	
9		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4	191.067.454,00	273	163.898.020,00	4	38.648.000,00	1,00	0,00	1	0,00	1	0,00	25	0	0,0	0,0	
10		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100	1.674.309.629,00	100	4.138.522.259,00	100	1.029.955.634,00	100,00	24.100.000,00	100	24.100.000,00	100	24.100.000,00	100	2,3	0,0	3,1	
11		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	283.828.716,00	1	2.031.403.802,00	1	553.375.843,00	0,00	6.500.000,00	0	6.500.000,00	0	6.500.000,00	0	1,2	0,0	0,0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat at Daerah Penangg ung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
1 2		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	36	1.343.522.519,00	36	2.074.701.457,00	12	464.115.991,00	3,00	17.600.000,00	3	17.600.000,00	3	17.600.000,00	25	3,8	0,0	0,0	
1 3		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36	46.958.394,00	36	32.417.000,00	12	12.463.800,00	3,00	0,00	3	0,00	3	0,00	25	0	0,0	0,0	
1 4		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100	9.831.872,00	100	19.945.600,00	100	10.347.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
1 5		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	6	9.831.872,00	6	19.945.600,00	2	10.347.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
Rata-rata capaian kinerja program (%)																100,54	5,76	99,63	0,52	
Predikat kinerja																Tinggi				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Patroli dalam rangka menjaga ketentraman ketertiban umum sudah rutin dilaksanakan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan sosialisasi secara persuasif dan humanis																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya : Melakukan sosialisasi secara persuasif dan humanis																				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
1.	Tujuan 2 : Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65		0,47		0,62												
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran		Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	100		100		100		100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
3.		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100	16.321.520.500,00	100	3.152.524.515,00	100	516.538.700,00	100,00	30.061.300,00	100	30.061.300,00	100	30.061.300,00	100	5,8	100	0,3	Satuan Polisi Pamong Praja
4.		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	14.163.843.569,00	100	797.120.302,00	100	37.975.100,00	100,00	19.451.300,00	100	19.451.300,00	100	19.451.300,00	100	51,2	0,0	43,4	
5.		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam	3	29.746.390,00	100	49.872.800,00	1	6.899.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
			Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya																	
6.		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36	62.737.995,00	36	61.522.602,00	12	10.020.000,00	3,00	0,00	3	0,00	3	0,00	25	0	0,0	0,0	
7.		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	36	14.792.100,00	12	39.166.400,00	12	3.354.000,00	3,00	1.424.500,00	3	1.424.500,00	3	1.424.500,00	25	42,5	0,0	41,9	
8.		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	36	91.235.325,00	12	75.918.000,00	12	9.841.700,00	0,00	18.026.800,00	0	18.026.800,00	0	18.026.800,00	0	183,2	0,0	167	
9.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan	63	13.965.331.759,00	23	570.640.500,00	4	7.860.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
			Legal Sesuai Standar Teknis Terkait																	
10.		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100	1.315.548.677,00	100	1.707.261.371,00	100	300.698.916,00	0,00	10.610.000,00	0	10.610.000,00	0	10.610.000,00	0	3,5	0,0	3,6	
11.		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	1.261.313.652,00	1	1.670.611.371,00	1	294.896.116,00	0,00	10.610.000,00	0	10.610.000,00	0	10.610.000,00	0	3,6	0,0	3,6	
12.		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1	54.235.025,00	1	36.650.000,00	1	5.802.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
13.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20	842.128.254,00	20	648.142.842,00	20	177.864.684,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
14.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	420	747.553.254,00	140	550.778.522,00	140	58.834.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
		Edukasi Masyarakat																		
15.		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7	94.575.000,00	21	97.364.320,00	21	119.030.684,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
Rata-rata capaian kinerja Per Program (%)																100	5,8	100	0,3	
Predikat kinerja																Tinggi				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Patroli dan kesiapsiagaan petugas piket 24 jam sudah rutin dilaksanakan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih rendah																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat																				
1.	Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,41		84,85		85,37												
2.	Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,41		84,85		85,37												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,25	7.103.761.713,00	84,66	31.404.183.515,36	82	8.071.894.954,00	87,26	114.388.377,00	87,26	114.388.377,00	87,26	114.388.377,00	106,4	1,4	106,1	1,6	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	154.608.334,49	100	71.631.918,00	100	22.404.800,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0	0,0	0,0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	12.586.690,49	30	13.610.440,00	10	4.043.000,00	4,00	0,00	4	0,00	4	0,00	40	0	0,0	0,0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21	42.021.644,00	21	58.021.478,00	7	18.361.800,00	5,00	0,00	5	0,00	5	0,00	71,4	0	0,0	0,0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	19.767.673.177,19	100	26.045.865.441,00	100	6.888.495.804,00	100,00	2.053.118,00	100	2.053.118,00	100	2.053.118,00	100	0	0,0	0,1	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	19.764.020.769,19	47	26.043.166.841,00	45	6.887.435.304,00	47,00	2.053.118,00	47	2.053.118,00	47	2.053.118,00	104,4	0	0,0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12	3.652.408,00	12	2.698.600,00	4	1.060.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD																	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	595.649.886,49	100	831.702.400,00	100	214.671.500,00	200,00	61.660.500,00	200	61.660.500,00	200	61.660.500,00	200	28,7	0,0	33,3	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21	481.261.512,00	7	611.044.800,00	4	132.627.700,00	4,00	61.660.500,00	4	61.660.500,00	4	61.660.500,00	100	46,5	0,0	46,9	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	135	114.388.374,49	45	220.657.600,00	45	82.043.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	1.026.503.460,00	100	1.470.857.420,00	100	248.200.000,00	100,00	11.487.000,00	100	11.487.000,00	100	11.487.000,00	100	4,6	0,0	4,9	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	20.554.140,00	1	27.561.400,00	1	9.738.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	63.795.160,00	3	96.719.300,00	4	20.712.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penangg ung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	23.886.548,00	5	28.946.302,00	7	7.623.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	57.963.300,00	36	71.719.100,00	3	14.700.000,00	1,00	2.380.000,00	1	2.380.000,00	1	2.380.000,00	33,3	16,2	0,0	17,6	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	30.037.652,00	24	34.583.540,00	12	8.882.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	21.600.000,00	3	21.220.000,00	1	5.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138	808.666.660,00	138	1.190.107.778,00	46	181.143.000,00	10,00	9.107.000,00	10	9.107.000,00	10	9.107.000,00	21,7	5	0,0	5,1	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	1.005.679.008,88	100	419.907.000,00	100	145.005.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	320.196.768,76	5	17.000.000,00	7	41.501.700,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	265.825.820,56	9	402.907.000,00	8	103.504.100,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan	100	983.710.402,00	100	655.181.250,32	100	197.615.124,00	100,00	20.152.385,00	100	20.152.385,00	100	20.152.385,00	100	10,2	0,0	12,6	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
		Urusan Pemerintahan Daerah	sesuai standar																	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96	286.705.474,00	72	379.332.747,00	24	66.503.124,00	6,00	8.789.331,00	6	8.789.331,00	6	8.789.331,00	25	13,2	0,0	13,2	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	697.004.928,00	72	542.169.251,32	24	131.112.000,00	6,00	11.363.054,00	6	11.363.054,00	6	11.363.054,00	25	8,7	0,0	12,2	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	2.090.447.603,00	100	2.223.934.491,00	100	355.501.926,00	100,00	19.035.374,00	100	19.035.374,00	100	19.035.374,00	100	5,4	0,0	7,3	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	1.854.283.838,00	30	1.310.960.631,00	33	242.970.300,00	8,00	19.035.374,00	8	19.035.374,00	8	19.035.374,00	24,2	7,8	0,0	6,6	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	7.758.225,00	10	7.150.000,00	5	1.800.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	80.393.680,00	18	76.259.860,00	29	20.739.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	7	105.511.860,00	6	829.564.000,00	2	89.992.626,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,0	0,0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangk at Daerah Penanggu ng jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (6+9)		11 = (10/7) x 100%		12 = (10/5) x 100%		17
		Lainnya	Dipelihara/Direha bilitasi																	
Rata-rata capaian kinerja Per Program (%)																100	7			
Predikat kinerja																Sang at Ting gi				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaporan dan pengadministrasian kegiatan yang kurang terkelola dengan baik																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memberikan dorongan dan motivasi kepada petugas yang menyusun laporan administrasi keuangan dan kegiatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memberikan dorongan dan motivasi kepada petugas yang menyusun laporan administrasi keuangan dan kegiatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya																				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 ini akan memuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, loks, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, di rumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada perubahan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 ini ada 1 perubahan Sasaran yang disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
1.	Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran masyarakat terhadap aturan perda dan perkara terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi	8,06	8,06
	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.	11,40	11,40
2.	Tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di Tingkat kabupaten/kota dan provinsi.	0,62	0,62
	Meningkatnya penanganan bahaya	Persentase respon penanganan	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	93%	100%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
	kebakaran	bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di Lokasi kejadian kebakaran.		
3.	Tujuan 3 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	A (85,37)	A (85,37)
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,	A (85,37)	A (85,37)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2025	
				Sebelum	Sesudah
			pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.		

3.2. Tindaklanjut LKJIP

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2024 pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS	Mengoptimalkan pelaksanaan patroli wilayah dan koordinasi dengan instansi terkait	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2	Memberikan sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	Memberikan sosialisasi kepada satlinmas	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
3	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Memberikan sosialisasi kepada anggota Relawan Pemadam Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan.

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja OPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, maka ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 terdapat 3 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Rekapitulasi perubahan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 yang mengalami perubahan

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Nilai	82 Nilai	8.071.894.954,00	8.148.421.989,04	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	22.404.800,00	22.404.800,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	4.043.000,00	1.796.500,00	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	18.361.800,00	7.668.800,00	
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	6.888.495.804,00	6.892.355.904,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.887.435.304,00	6.891.295.404,00	
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1.060.500,00	1.060.500,00	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
						SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD					
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	214.671.500,00	205.607.900,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	132.627.700,00	100.587.700,00	
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	45 Orang	82.043.800,00	39.381.000,00	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	248.200.000,00	249.618.900,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.738.000,00	10.096.800,00	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.712.600,00	20.712.600,00	
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	7.623.800,00	8.683.900,00	Perubahan jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	14.700.000,00	14.700.000,00	Perubahan jumlah paket bahan logistik yang disediakan
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	8.882.600,00	8.882.600,00	Perubahan jumlah paket bahan cetakan yang disediakan
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	12 Laporan	181.143.000,00	74.111.000,00	Perubahan jumlah keikutsertaan pada rapat luar daerah
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	145.005.800,00	161.061.700,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	6 Unit	41.501.700,00	22.159.200,00	Perubahan jumlah mebel yang disediakan
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	9 Unit	103.504.100,00	119.560.000,00	Perubahan jumlah peralatan dan mesin yang disediakan

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	197.615.124,00	246.853.210,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	66.503.124,00	100.729.810,00	Perubahan jumlah laporan yang disusun
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	131.112.000,00	143.323.400,00	Perubahan jumlah laporan yang disusun
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	355.501.926,00	378.642.675,04	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	33 Unit	242.970.300,00	243.738.830,00	
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit	29 Unit	20.739.000,00	20.739.000,00	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	89.992.626,00	311.994.945,04	
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	98.14% 97.71 %	97.71% 98.14 %	4.129.240.570,00	4.037.098.314,96	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
						KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan					
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	100 % 20%	100 % 20 %	3.088.937.736,00	3.265.677.816,96	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	80.933.800,00	21.258.900,00	
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	114.544.736,00	159.765.000,00	
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 Orang	45 Orang	175.570.100,00	63.705.500,00	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	4 laporan	2.679.241.100,00	2.787.744.080,96	
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan	4 Laporan	38.648.000,00	24.467.100,00	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	1.029.955.634,00	1.010.039.634,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	553.375.843,00	359.140.900,00	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	464.115.991,00	603.336.234,00	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12.463.800,00	12.463.800,00	
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100 %	100 %	10.347.200,00	10.347.200,00	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	1 Laporan	10.347.200,00	5.216.800,00	
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	100 %	516.538.700,00	316.595.800,00	3

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	37.975.100,00	217.518.700,00	
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	6.899.000,00	44.941.900,00	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	10.020.000,00	7.072.500,00	
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	3.354.000,00	8.566.700,00	
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang	12 Orang	9.841.700,00	90.161.768,00	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	8 Unit	7.860.400,00	22.856.400,00	Perubahan jumlah sarana prasarana yang disediakan
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100 %	100 %	300.698.916,00	88.193.600,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	294.896.116,00	74.745.332,00	
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.802.800,00	9.055.700,00	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20 %	20 %	177.864.684,00	118.330.984,00	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2025		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 Orang	70 Orang	58.834.000,00	20.822.100,00	Perubahan jumlah peserta sosialisasi
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	21 Desa/Kelu rahan	21 Desa/Kelu rahan	119.030.684,00	38.373.400,00	
J U M L A H										12.717.674.224,00	12.502.116.104,00	

Tabel 3.4. Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Satuan Polisi Pamong Praja					12.717.674.24,00	12.866.653.024,00	12.502.116.104,00							12.972.005.233,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					12.717.674.24,00	12.866.653.024,00	12.502.116.104,00							12.972.005.233,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					12.717.674.24,00	12.866.653.024,00	12.502.116.104,00							12.972.005.233,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82 Nilai	82 Nilai	8.071.894.954,00	8.156.545.089,04	8.148.421.989,04							6.945.787.678,00	
	1	05	01	201		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	22.404.800,00	22.404.800,00	22.404.800,00			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		21.309.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	05	01	2001	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	10 Dokumen	4.043.000,00	4.043.000,00	1.796.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			3.146.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2001	0016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	7 Laporan	18.361.800,00	18.361.800,00	7.668.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			18.163.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2002		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	6.888.495.804,00	6.892.355.904,00	6.892.355.904,00			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		5.648.955.978,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2002	0021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.887.435.304,00	6.891.295.404,00	6.891.295.404,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			5.647.997.378,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	05	01	2	00027	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	1.060.500,00	1.060.500,00	1.060.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			958.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	0055	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	214.671.500,00	205.607.900,00	205.607.900,00			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja		194.439.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	0052	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		4 Paket	4 Paket	132.627.700,00	132.627.700,00	100.587.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			138.085.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	0050	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		45 Orang	45 Orang	82.043.800,00	72.980.200,00	39.381.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			56.353.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	05	01	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	248.200.000,00	249.618.900,00	249.618.900,00			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja		249.139.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	9.738.000,00	10.096.800,00	10.096.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			7.670.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	20.712.600,00	20.712.600,00	20.712.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			18.323.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		7 Paket	6 Paket	7.623.800,00	8.683.900,00	8.683.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			6.258.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	1 Paket	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			14.175.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	05	01	2065	00	Penyediaan Paket Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	1 Paket	8.882.600,00	8.882.600,00	8.882.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			7.893.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2066	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			5.670.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2069	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		46 Laporan	12 Laporan	181.143.000,00	181.143.000,00	74.111.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			189.148.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2077		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	-	100 %	100 %	145.005.800,00	161.061.700,00	161.061.700,00			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja		108.500.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2075	00	Pengadaan Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		7 Unit	6 Unit	41.501.700,00	41.501.700,00	22.159.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			63.706.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	05	01	2	00076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	9 Unit	103.504.100,00	119.560.000,00	119.560.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			44.794.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	197.615.124,00	246.853.210,00	246.853.210,00			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja		237.072.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	0082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	12 Laporan	66.503.124,00	100.729.810,00	100.729.810,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			69.828.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	0084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 Laporan	12 Laporan	131.112.000,00	146.123.400,00	143.323.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			167.244.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2	009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	355.501.926,00	378.642.675,04	378.642.675,04			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja		486.369.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	05	02	2	0	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	-	100 %	100 % 20 %	3.088.937.736,00	3.265.677.816,96	3.265.677.816,96			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Warga masyarakat kota Blitar		4.296.907.755,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2	0	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota		12 Dokumen	12 Dokumen	80.933.800,00	31.330.300,00	21.258.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			739.836.625,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2	0	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentera		1 Dokumen	1 Dokumen	114.544.736,00	200.348.436,00	159.765.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			510.191.430,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode						Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							man dan Ketertiban Umum															
	1	05	02	2001	0015		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		45 Orang	45 Orang	175.570.100,00	166.506.500,00	63.705.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi		170.639.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2001	0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan , dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		4 laporan	4 laporan	2.679.241.100,00	2.828.844.580,96	2.787.744.080,96	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi		2.829.694.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							n														
	1	05	02	200116		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		4 Laporan	4 Laporan	38.648.000,00	38.648.000,00	24.467.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			46.546.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2002		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum	-	100 %	100 %	1.029.955.634,00	1.010.039.634,00	1.010.039.634,00			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Warga Masyarakat Kota Blitar		1.081.438.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode						Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Perda dan Perkada														
	1	05	02	2002	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 Laporan	1 Laporan	553.375.843,00	369.599.600,00	359.140.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			615.883.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2002	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		12 Laporan	12 Laporan	464.115.991,00	627.976.234,00	603.336.234,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			454.115.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	05	02	2012	0122	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	12 Laporan	12.463.800,00	12.463.800,00	12.463.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			11.439.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2013	003	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	-	100 %	100 %	10.347.200,00	10.347.200,00	10.347.200,00			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	ASN Satuan Polisi Pamong Praja		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2013	006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		2 Laporan	1 Laporan	10.347.200,00	10.347.200,00	5.216.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani		100 %	100 %	516.538.700,00	424.043.284,00	316.595.800,00							597.871.400,00	
	1	05	04	201		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	-	100 %	100 %	37.975.100,00	217.518.700,00	217.518.700,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Warga Masyarakat Kota Blitar		47.107.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2011		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota Setiap Tahunnya		1 Dokumen	1 Dokumen	6.899.000,00	73.316.000,00	44.941.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			7.246.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	05	04	200012	00	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadama n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota		12 Laporan	12 Laporan	10.020.000,00	7.072.500,00	7.072.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			15.283.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	200013	00	Penyelamata n dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelama tan/ Evaku asi Saat Penanggul angan Kebakaran dan Non Kebakaran		12 Dokume n	12 Dokume n	3.354.000,00	8.566.700,00	8.566.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			3.603.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	200017	00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampil an Teknis dan Analisis Dalam Pencegaha n dan		12 Orang	12 Orang	9.841.700,00	112.817.900,00	90.161.768,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			11.331.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Penanggulan Kebakaran														
	1	05	04	2017	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulan gan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		4 Unit	8 Unit	7.860.400,00	15.745.600,00	22.856.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup			9.642.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2022	02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	-	100 %	100 %	300.698.916,00	88.193.600,00	88.193.600,00			-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi	Warga Masyarakat Kota Blitar		322.650.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2021	00	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki		1 Dokumen	1 Dokumen	294.896.116,00	79.137.900,00	74.745.332,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi			307.271.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode						Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Sistem Proteksi Kebakaran															
	1	05	04	2002	00	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan /Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		1 Dokumen	1 Dokumen	5.802.800,00	9.055.700,00	9.055.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup		15.379.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	04	2004			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	-	20 %	20 %	177.864.684,00	118.330.984,00	118.330.984,00			-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	Warga Masyarakat Kota Blitar	228.113.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	04	2004	00	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan		140 Orang	70 Orang	58.834.000,00	32.524.400,00	20.822.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup		182.113.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
Bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 menyesuaikan anggaran yang tersedia.
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 serta diselaraskan dengan P RKPD Kota Blitar tahun 2025;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 ;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
 - d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Perubahan Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya
3. Rencana Tindak Lanjut
Perubahan Rencana Kerja (P Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Perubahan Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.